

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK MEMPEROLEH DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAHUN 2009-2012

**Oleh :Lauhin Mahfudz
Email : lauhin_m@yahoo.com
Pembimbing :Dr. Hasanuddin, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan-Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu sosial Dan Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The research was conducted in Bagansiapiapi Rokan Hilir. This study was done to determine and analyze the Local Government Strategy Rokan Hilir To Acquire General Allocation Fund (GAF) Year 2009-2012. Where the Government of the year 2009-2011 Rokan Hilir not get General Allocation Fund and the Government in 2012 Rokan Hilir back Getting the General Allocation Fund. Rokan Hilir Government through the Department of Revenue is quite long struggle, finally Rokan Hilir accept the General Allocation Fund (GAF) Rp. 286 Billion over the past three years Rokan Hilir not accept the General Allocation Fund (GAF). So from the above problems, the problem can be formulated How Local Government Strategy Rokan Hilir To Acquire General Allocation Fund (GAF) Year 2009-2012?

In this study, the authors used a qualitative descriptive approach as a method of problem solving and discovery of data sources. The data required for this study is the primary data directly from the informant research and research findings at the time the study took place. This research data collection techniques are interviewing techniques and documentation techniques. Furthermore, after the data is analyzed by qualitative descriptive technique, which is done by analyzing the data and facts.

The results showed that the Government Strategy for Obtaining Rokan Hilir General Allocation Fund Year 2009-2012 with 3 (three) points Strategy won the general allocation fund. The first: Improving Planning consisting of Local Government, Regional Infrastructure and Social Affairs, Culture, and Religion. The second: Improving Performance (Regional Development) consisting of Attraction Development, Education, Health and HR (Human Resources) and Agriculture and estates. The third: Main - Informal lobby consisting of Main Facilitated by the Provincial Government of Riau, Riau and Figures Facilitated Main Lobby Jump To Related officials in Jakarta.

Keywords: Strategy, Government Rokan Hilir, General Allocation Fund (GAF)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melalui Dana Alokasi Umum, pemerintah bertujuan untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan potensi daerah, sehingga daerah dapat membelanjakan dana tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan daerahnya. Dalam Dana Alokasi Umum ini tidak terdapat batasan mengenai bagaimana dana tersebut dibelanjakan, sehingga daerah dapat dengan leluasa memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan yang diinginkan.

Namun, masalah yang muncul adalah kemampuan daerah dalam mengelola Dana Alokasi Umum. Apabila daerah kurang mampu mengelola dana tersebut, maka tidak menutup kemungkinan yang terjadi adalah semakin meningkatnya ketergantungan daerah pada dana perimbangan ini. Pengelolaan terhadap Dana Alokasi Umum sebaiknya dilakukan dengan selektif agar dananya tidak sia-sia dan bermanfaat bagi publik. Pemanfaatan Dana Alokasi Umum yang dominan untuk belanja pegawai negeri sipil daerah dapat berdampak pada berkurangnya alokasi belanja modal, berkurangnya alokasi dana untuk penciptaan lapangan pekerjaan, ataupun berkurangnya alokasi dana untuk program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, sebaiknya pemanfaatan Dana Alokasi Umum dibuat seimbang dengan belanja lainnya atau mengkaji kembali alokasi yang sangat penting bagi daerah, namun tidak pula melupakan belanja pegawai/penggajian pegawai sebagai suatu

keharusan daerah untuk mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia.

Dana Alokasi Umum diharapkan menjadi sebuah modal dalam rangka menciptakan pemanfaatan yang lebih baik. Sebagai contoh, jika dana dialokasikan untuk kepentingan pembangunan, misal infrastruktur atau layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan sebagainya) atau upaya perluasan lapangan pekerjaan, maka hal ini akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dengan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik maupun mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja di sejumlah sentra-sentra lapangan kerja. Dengan demikian, Dana Alokasi Umum menjadi penting bagi suatu daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada daerah yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum bersifat "*block grant*" yang berarti penggunaanya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Pada organisasi pemerintahan istilah *Lobi* mulai dilihat sebagai salah satu ketrampilan untuk manajer dalam mengelola sisi bayangan organisasi. Banyak hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan organisasi pemerintahan dalam peningkatan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pengambilan keputusan, serta mengenai keuangan daerah dan kegiatan penunjang yang lain membutuhkan keterampilan manajerial dalam melakukan lobi terutama pada para stakeholders (pihak lain yang berkepentingan) di organisasi.

Dalam dunia politik ada istilah *Lobi* adalah merupakan usaha individu atau kelompok dalam kerangka berpartisipasi politik, untuk menghubungi para pemimpin politik atau pejabat pemerintah dengan tujuan mempengaruhi keputusan pada suatu masalah yang dapat menguntungkan sekelompok orang. Menurut **Anwar (1997)** Lobi definisi yang lebih luas adalah suatu upaya informal dan persuasif yang dilakukan oleh satu pihak (perorangan, kelompok, Swasta, pemerintah) yang memiliki kepentingan tertentu untuk menarik dukungan dari pihak pihak yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang, sehingga target yang diinginkan tercapai.

Namun demikian, daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Riau yaitu Kabupaten Rokan Hilir tidak menerima Dana Alokasi Umum (DAU) karena penerimaan Kabupaten Rokan Hilir dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sudah sangat besar, padahal Kabupaten Rokan Hilir sangat membutuhkan Dana Alokasi Umum untuk membiayai gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Honorer serta biaya pembangunan. Terhitung sejak tahun 2009 lalu di Provinsi Riau yang merupakan daerah penghasil minyak dan gas (Migas), yakni Kabupaten Rokan Hilir tidak lagi mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Daerah
Dana Alokasi Umum Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2009-2012
(dalam Rp juta)

No	Sektor Dana Perimbangan	2009	2010	2011	2012
1	Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	1.216,369,78	1.241,583,57	1,214,646.00	1,601,501.00
2	Dana Alokasi Umum	-	-	-	286,866,00
3	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
4	Dana Alokasi Khusus	32.436,00	21.662,70	19,159.00	35,703.00
	Jumlah	1.274,025,03	1.291,551,01	1,419,854,00	2,601,501.00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada tahun 2009-2011 Kabupaten Rokan Hilir tidak lagi pernah menerima atau mendapat dana alokasi umum dari pemerintah pusat, Penghapusan Dana Alokasi Umum tersebut

dari daftar penerima Dana Alokasi Umum beralasan karena penerimaan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sudah sangat besar. Daerah yang berpendapatan tinggi akan diberikan sedikit dana sementara daerah yang berpendapatan rendah akan diberikan dana yang lebih besar.

Bila hal ini yang dilakukan berarti pemerintah pusat mem-penalti daerah yang berpendapatan rendah dan memberi insentif agar daerah tetap “tertinggal”. Struktur insentif seperti ini memiliki dampak negatif terhadap stimulasi pembangunan daerah. Sehingga, alokasi yang ditujukan langsung untuk pemeratakan pendapatan perkapita akan berpotensi mempenalti daerah-daerah yang telah berupaya keras untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti Kabupaten Rokan Hilir yang telah berusaha keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan sangat serius namun justru Dana Alokasi Umum-nya dikurangi yang justru dapat melemahkan usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Alokasi Dana Umum diharapkan mampu mengurangi dampak negatif yang dihadapi Kabupaten Rokan Hilir yang ditimbulkan dari pengaruh negatif daerah di sekitar Kabupaten Rokan Hilir. Misalnya, dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mengurangi efek overload di ruas-ruas jalan Kabupaten karena aktivitas produksi yang menuju dan keluar dari Kabupaten Rokan Hilir. Dana Alokasi Umum menyumbang pada stimulasi ekonomi daerah lewat efeknya terhadap perbaikan efisiensi produksi. Jika jumlah Dana Alokasi Umum sudah tidak mencukupi untuk belanja pegawai, maka kemampuan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk investasi input produksi yang lebih optimal akan berkurang.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pendapatan Daerah dengan perjuangan terbilang cukup panjang. Akhirnya Kabupaten Rokan Hilir kembali menerima Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 268,866,00 milyar yang selama tiga tahun belakangan ini Kabupaten Rokan Hilir sama sekali tidak menerima Dana Alokasi Umum.

Perubahan kebijakan fiskal yang ekstrim ini jelas telah mengacaukan perencanaan pembangunan di daerah-daerah. Sejumlah daerah akhirnya frustrasi karena bingung mengatur anggaran untuk pembiayaan rutin. Kabupaten Rokan Hilir misalnya, yang semula selama 3 (tiga) tahun seharusnya mendapat Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 940,866,00 M kini hanya digantikan dengan RP. 286,866.00 M dana penyeimbang. Padahal, melalui Dana Alokasi Umum itulah selama ini Kabupaten Rokan Hilir memiliki kemampuan bukan saja untuk membayar gaji para tenaga honor, termasuk gaji PNS, tapi juga membiayai program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***“Strategi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk Memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2009-2012”***.

1.2. Perumusan Masalah

Dengan telah ditetapkan strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mendapatkan Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum Maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimanakah Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2009-2012 ?

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah “ Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2009 – 2012.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dari tujuan diatas, diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk :

1. Memperkaya informasi dalam rangka memperdalam ilmu pengetahuan tentang Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU).
2. Sebagai bahan untuk pengembangan kegiatan penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

1.4. Kerangka Teoritis

1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. (Renstra Badan Pelayanan Terpadu Perizinana dan penanaman Modal Rokan Hulu 2011-2016). Berdasarkan defenisi dari teori diatas maka penulis merasa cocok dan sesuai dengan menggunakan teori strategi menurut **Bintaro**

dan Mustopadidjaja serta **Siagian** yang menyatakan strategi adalah “ keseluruhan langkah (kebijakan-kebijakan) dengan perhitungan yang pasti guna mencapai suatu tujuan atau untuk mengatasi suatu persoalan. (**Riyadi dan Deddy S Bratakusuma, 2003 : 68**). Sementara itu dalam literturnya tentang manajemen strategi, **Siagian (1995)** mengemukakan bahwa “Strategi adalah cara menentukan misi pokok suatu organisasi strategi merupakan keputusan dasar yang menyatakan secara garis besar.

Namun untuk menunjang dengan fenomena yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir pendapat **Lawton Rose** juga perlu dipertimbangkan. Sebagaimana pendapat dari **Lawton dan Rose (1994)** mengemukakan secara implisit makna dari strategi, dimana ia mengemukakan “ *in order for strategic planning and decision making to be effective, a different set of value needs to be held by senior officials. Vision, Leadership, the ability to be proactive, flexible and forward thinking are the essential qualities that need to be present*” yang berarti supaya perencanaan strategis dan pengambilan keputusan-keputusan menjadi efektif, serangkaian nilai-nilai yang berbeda perlu dimiliki oleh Pemimpin Senior. Visi, kepemimpinan, kemampuan untuk bertindak proaktif, fleksibel, dan berpikir kedepan adalah persyaratan yang perlu ada”. (**Riyadi dan DeddyS Bratakusumah. 2003 : 69**).

Namun untuk memenuhi semua target ataupun tujuan yang ingin dicapai maka suatu strategi yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria seperti yang dinyatakan **Bryson (1990)** :

1. Strategi secara teknis harus dapat dijalankan

2. Strategi secara politis harus dapat diterima oleh para *Key Stake Holder*.
3. Strategi harus sesuai dengan filosofi dan nilai-nilai organisasi.
4. Strategi harus bersifat etis, moral, legal, dan merupakan keinginan organisasi untuk menjadi lebih baik.
5. Strategi harus sesuai dengan isu yang hendak di pecahkan.

Selain kriteria strategi yang telah diuraikan diatas tersebut, namaun strategi itu sendiri juga harus memiliki manfaat. Manfaat perencanaan strategi menurut **Bryson (1999:7)** yaitu :

1. Mengembangkan cara berpikir dan bertindak strategis
2. Memperbaiki pengambilan keputusan
3. Meningkatkan daya tanggap organisasi dan memperbaiki kinerja.
4. Dapat secara langsung bermanfaat bagi anggota organisasi.

2. Kebijakan Pemerintah

Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut **Werf (1997)** yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Sesuai dengan system administrasi Negara Republik Indonesia, kebijakan dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Kebijakan Internal (Manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri
2. Kebijakan eksternal (Publik), yaitu suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum, sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis.

Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (KepMen) dan lain lain. Sedangkan jika kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh pemerintah daerah akan melahirkan Surat keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan lain lain.

3. Kebijakan Publik

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (**Nugroho R., 2004; 1-7**).

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus

memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Sementara itu pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (**Thomas Dye, 1992; 2-4**). Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai public actor, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Seorang pakar mengatakan: (**Aminullah Muhammadi, 2001: 371 – 372**).

1.6. Defenisi Konsep

1. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas

ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka APBD.
3. Dana Alokasi Umum adalah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah.
4. Strategi adalah cara/langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU).
5. Lobi diartikan sebagai aktivitas komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi agar pesan-pesan pelobi diterima dengan jalan memberi data dan informasi, mempengaruhi, mendidik, membujuk, memaksa dan melibatkan pribadi-pribadi berpengaruh termasuk mengikutsertakan pihak lain ke dalam koalisinya.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif dilakukan dengan menganalisa data dan fakta. Metode penelitian deskriptif sebagai sebuah proses pemecahan suatu masalah yang diteliti dengan menerangkan keadaan sebuah objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian yang sebenarnya dari objek yang menjadi tujuan diadakan penelitian ini. Maka penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Rokan Hilir dipilih sebagai lokasi penelitian adalah karena penulis menemukan bahwa dari tahun 2009-2011 Kabupaten Rokan Hilir tidak lagi mendapatkan/memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU).

1.7.3. Jenis Sumber Data

a. Data Primer

Menurut **Trianto dan Titik (2010:279)** “data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya”. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mengenai “Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Untuk Memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2009-2012”. Adapun data primer diperoleh melalui tanggapan responden, yaitu :

- a. Wakil Bupati Rokan Hilir
- b. DPRD Komisi I
- c. Kepala Dispenda Provinsi Riau
- d. Sekda Kabupaten Rokan Hilir
- e. Kabag Keuangan Kab. Rokan Hilir

- f. Kepala Dispenda Kab. Rokan Hilir
- g. Tokoh Masyarakat (LSM HIMBAU Bagansiapiapi)

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder menurut **Trianto dan Titik (2010:280)** adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber seperti buku, koran, internet, laporan-laporan, dan berbagai hasil penelitian data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada serta pemberitaan media massa seputar masalah tersebut. Adapun Data Sekunder tersebut berupa :

1. Keadaan geografis dan demografis Kabupaten Rokan Hilir
2. Struktur organisasi dan tata kerja Kabupaten Rokan Hilir
3. Arsip, data, laporan dan informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. buku-buku ilmiah, data statistic.

1.7.4. Informan

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberi keterangan. Informan adalah suatu istilah yang memberikan pengertian kepada seseorang atau subjek yang bertugas memberikan data dalam bentuk informasi yang ia ketahui. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposif sampling.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data-data yang dibutuhkan ada beberapa teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan

langsung ke lokasi penelitian, serta terhadap objek yang akan diteliti.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan serangkaian wawancara atau tanya jawab langsung pada informan, pertanyaan yang diajukan mengenai: “Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Untuk Memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2009-2012”

c. Dokumentasi

Merupakan sumber data yang diperoleh dari media cetak, dokumen-dokumen, peraturan dan undang-undang terkait dengan “Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Untuk Memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2009-2012”.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh terkumpul, lalu disusun dan diklasifikasikan berdasarkan tema dan fokus penelitiannya. Penganalisaan data dalam penelitian ini dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memberikan gambaran secara umum dari penelitian yang menghasilkan data mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari variabel yang diteliti dan disajikan dengan uraian dan penjelasan berdasarkan data hasil penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

2.1.1. Sejarah Pemekaran

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibukotanya terletak di Bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kabupaten ini sebelumnya termasuk ke dalam Kabupaten Bengkalis. Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota Bagansiapiapi, tepatnya di Jalan Merdeka No 58. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 8.941 km² dan penduduk sejumlah 349.771 jiwa. Rokan Hilir terbagi dalam 15 Kecamatan dan 83 desa.

Rokan Hilir dibentuk dari tiga negerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak. Distrik pertama didirikan Hindia Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1890. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Tionghoa berkembang pesat,

Bekas wilayah Kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dengan ibukota Bagansiapiapi.

2.1.2. Kondisi geografis

Kabupaten Rokan Hilir secara geografis berada dibagian paling barat dan utara dari propinsi Riau yang juga merupakan wilayah pesisir timur pulau Sumatra. Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis sejak tahun 1999, terletak pada posisi antara $1^{\circ} 14'$ – $2^{\circ} 30'$ Lintang Utara dan $100^{\circ} 16'$ – $101^{\circ} 21'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 Km².

Secara administrasi, Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan tersebut adalah.

1. Kecamatan Bangko
2. Kecamatan Sinaboi
3. Kecamatan Rimba Melintang
4. Kecamatan Bangko Pusako
5. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
6. Kecamatan Tanah Putih
7. Kecamatan Kubu
8. Kecamatan Bagan Sinembah
9. Kecamatan Pujud
10. Kecamatan Simpang Kanan
11. Kecamatan Pasir Limau Kapas
12. Kecamatan Batu Hampar
13. Kecamatan Rantau Kopar
14. Kecamatan Pekaitan
15. Kecamatan Kubu Babussalam
- 16.

2.1.3. Dana Alokasi Daerah (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi

salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan Dana Alokasi Umum adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota menerima Dana Alokasi Umum dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah.

Namun demikian, daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Riau yaitu Kabupaten Rokan Hilir tidak menerima Dana Alokasi Umum (DAU) karena penerimaan Kabupaten Rokan Hilir dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sudah sangat besar, padahal Kabupaten Rokan Hilir sangat membutuhkan Dana Alokasi Umum untuk membiayai gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Honorer serta biaya pembangunan. Terhitung sejak tahun 2009 lalu di Provinsi Riau yang merupakan daerah penghasil minyak dan gas (Migas), yakni Kabupaten Rokan Hilir tidak lagi mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pendapatan Daerah dengan perjuangan terbilang cukup panjang, akhirnya Kabupaten Rokan Hilir kembali menerima Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 268,866,00 milyar dari sebesar Rp. 940,866,00 milyar yang selama tiga tahun belakangan ini Kabupaten Rokan Hilir sama sekali tidak menerima Dana Alokasi Umum.

BAB III

STRATEGI MERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)

3.1. Memperbaiki Perencanaan

Memperbaiki perencanaan merupakan suatu sistem dimana membuat, mengimplementasikan, dan mengendalikan keputusan penting lintas fungsi dan level dalam pemerintahan. Memperbaiki perencanaan harus menjawab empat pertanyaan mendasar yaitu kemana kita pergi (misi), bagaimana kita memperolehnya (strategi), apakah tindakan kita (anggaran), dan bagaimana kita mengetahui jalur yang kita lalui (pengendalian).

Pada level Pemerintah, memperbaiki perencanaan menyarankan pertimbangan manajemen tradisional berhubungan dengan maksud (tujuan dan sasaran), kebijakan dan perencanaan program, alokasi sumber daya, dan evaluasi hasil. Mekanisme perencanaan mengantarkan suatu elemen dari rasionalitas yang komprehensif. Memperbaiki perencanaan sesuai dengan sektor publik dan memperhatikan metode perencanaan sebagai kekuatan serta kendala.

Memperbaiki perencanaan adalah keseluruhan langkah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan perhitungan yang pasti guna mencapai suatu tujuan atau untuk mengatasi suatu persoalan. Bahwa secara umum Kabupaten Rokan Hilir sangat membutuhkan dana dari pemerintah pusat. Hingga saat ini dapat dilihat kontribusi pusat ke daerah masih rendah. Adapun Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Memperoleh Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut.

3.1.1. Pemerintah Daerah

Berbagai perencanaan dan program pembangunan akan terlaksana secara baik mana kala tedapat tata kelola pemerintahan yang baik. Suatu pemerintahan dikelola secara baik mana kala dibutuhkan dana dari Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kualitas dalam melayani kebutuhan masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah.

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tantangan yang menjadi salah satu tugas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Adanya tata kelola pemerintahan yang baik akan mempermudah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public. Sementara itu, adanya birokrasi yang memadai akan memungkinkan terlaksananya program-program pembangunan dan pelayanan public lebih baik.

3.1.2 Infrastruktur Daerah

Di antara prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau daerah adalah adanya modal infrastruktur, khususnya insfrastruktur fisik. Adanya infrastruktur fisik akan memungkinkan proses produksi yang lebih efisien dan efektif. Demikian pula proses distribusi, akan bias dilakukan lebih efisien dan efektif. Karena itu, dinegara atau daerah manapun, ketika terdapat percepatan perbaikan ekonomi, mau tidak mau harus memperrhatikan infrastruktur.

Kabupaten Rokan Hilir termasuk Kabupaten hasil pemekaran yang relative muda yang memiliki ruang kosong untuk pembangunan yang luas. Oleh karena itu penataan pembangunan infrastruktur relative lebih mudah dari segi wilayah dan administrasi. Disamping itu, Kabupaten Rokan Hilir merupakan wilayah pesisir

pulau Sumatera. Pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan NKRI khususnya pembangunan infrastruktur untuk pulau-pulau terluar merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dalam rangka kesatuan dan ketahanan.

3.1.3. Sosial, Budaya, dan Agama

Memasyarakatkan nilai-nilai budaya seperti Budaya Melayu melalui pendidikan disekolah-sekolah, publikasi melalui penerbitan buku, media cetak dan penyelenggaraan acara seni dan budaya dan aplikasi gedung dan lingkungan. Penerapan Budaya Melayu ditengah masyarakat harus memperhatikan adat yang bersendikan syara, syara bersendikan Kitabullah dimana Islam menjadi pilar utamanya.

Memasyarakatkan nilai-nilai mulia yang terdapat dalam tunjuk ajar Melayu seperti jujur, amanah, sopan santun, cerdik dan sifat lainnya kedalam setiap lapisan kehidupan, baik dimasyarakat, pemerintah, dan aktivitas lainnya. Sehingga Budaya Melayu tidak hanya terwujud dalam symbol, tapi juga menjadi ruh dan motivasi dalam menjalankan pembangunan.

Memajukan dan menciptakan program pembinaan keagamaan pada semua lapisan masyarakat, aparatur pemerintah, anak-anak dan pemuda melalui pengajian, pelatihan dan bimbingan intensif. Sehingga pengetahuan agama dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari menjadi nyata.

3.2. Memperbaiki Kinerja (Pembangunan Daerah)

Kabupaten Rokan Hilir termasuk Kabupaten hasil pemekaran yang relative muda yang memiliki ruang kosong untuk pembangunan yang luas. Oleh karena itu penataan pembangunan infrastruktur relative lebih mudah dari segi wilayah dan administrasi. Disamping itu, Kabupaten Rokan Hilir merupakan wilayah pesisir pualau Sumatera. Pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan NKRI khususnya pembangunan infrastruktur untuk pulau-pulau terluar merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dalam rangka kesatuan dan ketahanan.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mencari perhatian dari pemerintah pusat untuk memperoleh Dana Alokasi Umum yang mana dengan adanya kinerja pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam bidang pembangunan. Pembangunan tersebut membuktikan bahwa Kabupaten Rokan Hilir sangat membutuhkan Dana Alokasi umum tersebut. Sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Rokan menjadikan Kabupaten Rokan Hilir sebagai negeri seribu kubah. “Terwujudnya Rokan Hilir yang maju, sejahtera dan berdaya saing tahun 2016”

3.2.1. Pembangunan Objek Wisata

Salah satu objek wisata yairut Pulau Jemur, pulau yang terletak sekitar 45 mil dari Ibukota Kabupaten Rokan Hilir, Bagan Siapi-api dan 45 mil dari negara tetangga Malaysia. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang terdekat dengan Pulau Jemur. Sebenarnya pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau terdiri dari beberapa buah pulau antara lain, Pulau Tekong Emas, Pulau Tekong Simbang,

Pulau Labuhan Bilik serta pulau-pulau kecil lainnya.

Pulau yang terletak di Kepulauan Jemur berbentuk lingkaran sehingga bagian tengah merupakan laut yang tenang pada musim angin Barat Laut tiba. Gelombang di Selat Malaka sangat besar sehingga biasanya nelayan-nelayan yang sedang menangkap ikan di sekitar perairan Pulau Jemur berlindung di bagian tengah di laut yang tenang. Setelah gelombang laut mengecil atau badai berkurang barulah para nelayan ke luar untuk memulai aktivitas menangkap ikan kembali.

Pulau Jemur memiliki pemandangan dan panorama alam yang indah, selain Pulau Jemur, amat kaya dengan hasil lautnya dan penyu-penyu yang naik ke pantai dan bertelur. Penyu menyimpan telurnya di bawah lapisan pasir pantai. Satwa langka ini dapat bertelur 100-150 butir setiap ekornya. Selain itu Pulau Jemur juga memiliki potensi wisata lainnya seperti gua Jepang, menara suar, bekas tapak kaki manusia, pergi tulang, sisa-sisa pertahanan Jepang, batu panglima Layar, taman laut dan pantai berpasir kuning emas.

3.2.2. Pendidikan, Kesehatan dan SDM (Sumber Daya Manusia)

Pendidikan, Kesehatan dan Sumber Daya Manusia merupakan isu penting dalam pembangunan Kabupaten Rokan Hilir. Isu pendidikan dan kesehatan merupakan permasalahan yang dihadapi pada pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang tersebar memerlukan penyediaan infrastruktur transportasi agar tingkat aksesibilitas penduduk terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan semakin baik.

Pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan akses penduduk terhadap

pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Akibat kondisi wilayah yang cukup sulit karena banyak dipisahkan oleh sungai dan sangat tersebar, maka fasilitas dan tenaga bidang pendidikan dan kesehatan masih belum terdistribusi merata, tetapi hanya terkonsentrasi wilayah perkotaan dan wilayah pertumbuhan.

3.2.3. Pertanian dan perkebunan

Isu penting dalam perekonomian daerah adalah pelaksanaan pembangunan ekonomi untuk dapat menggantikan sector minyak dan gas sebagai penopang perkembangan perekonomian Kabupaten Rokan Hilir. Sector pertanian dan perkebunan sebagai sector dominan dalam perekonomian tanpa minyak dan gas juga masih didominasi oleh sector perkebunan yang lebih banyak dikuasai perusahaan swasta besar.

Dalam hal ini pemerintah memerlukan dana yang cukup besar dari pemerintah pusat untuk mendukung sector pertanian dan perkebunan sebagai sector unggulan, maka pemanfaatan keunggulan komparatif yakni potensi khusus wilayah Rokan Hilir yang beragam (pesisir, pinggir sungai, rawa, daratan rendah) belum dimanfaatkan secara optimal. Disisi lain untuk pengembangan ekonomi kerakyatan, pemanfaatan lahan untuk kegiatan perekonomian yang produktif seperti pembangunan kebun sawit untuk masyarakat juga belum berjalan secara maksimal dalam pengembangan perekonomian kerakyatan.

3.3. Lobi - Lobi Informal

Dalam dunia politik istilah “pelobian” adalah merupakan usaha individu atau kelompok dalam kerangka berpartisipasi politik, untuk menghubungi para pemimpin politik atau pejabat pemerintah dengan tujuan mempengaruhi keputusan pada suatu masalah yang dapat menguntungkan sekelompok orang. Dengan demikian ada upaya dari pihak yang berkepentingan untuk aktif melakukan pendekatan kepada pihak lain agar bisa memahami pandangan atau keinginannya dan kemudian menerima dan mendukung apa yang diharapkan oleh pelaku lobbying.

Strategi yang ditempuh disini adalah melaksanakan aksi total secara menyeluruh yang dianggap perlu dan mengusahakan Dana Alokasi Umum dapat diterima oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Perlunya seluruh perangkat pemerintahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan strategi, bahwa Kabupaten Rokan Hilir masih membutuhkan Dana Alokasi Umum selain Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat.

3.3.1. Lobi Difasilitasi Oleh Pemerintah Provinsi Riau

Lobi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Memperoleh Dana Alokasi Umum adalah pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir yang sebelum sudah mengirim surat resmi yang akan diajukan kepada pemerintah pusat. Surat tersebut akan dikirim ke pemerintah pusat, melalui Gubernur Riau. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir menjumpai pihak Gubernur Riau yaitu Dinas Pendapatan Provinsi Riau untuk mengklarifikasi

mengenai Dana Alokasi Umum yang tidak di terima Kabupaten Rokan Hilir .

3.3.2. Lobi Difasilitasi Tokoh Riau

Tokoh Riau juga tak kalah sengit memperingatkan pusat seperti politisi Riau yang berada di Senayan. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengetahui dana triliunan rupiah yang belum diberikan pusat ke daerah. Namun, hanya daerah yang lihai dalam melobi saja yang bakal mendapatkan dana alokasi tersebut itu. Selama ini transparansi atau keterbukaan menjadi sesuatu yang mahal, apalagi menyangkut informasi atau data tentang keuangan.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Ini termasuk hak daerah untuk memperolehnya. Dan juga Komitmen membangun daerah Riau harus diutamakan. Oleh sebab itu ditegaskannya masyarakat harus kompak bersatu dengan pemerintah daerah untuk merebut dana pusat

3.3.3. Lobi Langsung Kepada Pejabat Terkait di Jakarta

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yaitu Dinas pendapatan Rokan Hilir bersama pihak Pemerintah Provinsi Riau yaitu Dinas pendapatan Provinsi Riau bersama-sama melakukan kunjungan ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia meminta kejelasan mekanisme pembagian dana berimbangan yaitu masalah Dana Alokasi Umum yang tidak di peroleh Kabupaten Rokan Hilir.

Dan juga Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir juga ke Dirjen Migas dan Dirjen Bagi Hasil di

Jakarta untuk membahas masalah tersebut. Dan tidak sampai disitu juga Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bersama dengan pihak Provinsi Riau juga melakukan rapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan anggota DPR-RI utusan Provinsi Riau. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pendapatan Daerah Rokan Hilir menanyai hal yang mengenai Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan pusat dan daerah, selain sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik, juga sebagai upaya mencegah penyalahgunaan keuangan negara.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk mendapatkan Dana Alokasi Umum. Dan strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir meliputi, strategi memperbaiki perencanaan, memperbaiki kinerja dan lobi-lobi informal . Perjuangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir akhirnya membuahkan hasil pada tahun 2012 yang mana mendapatkan kembali Dana Alokasi Umum dengan melibatkan orang-orang yang mempunyai pengaruh, yang pandai berbicara serta berargumentasi kepada Pemerintah Pusat untuk memperjuangkan Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut.

4.2. Saran

Kepada Pemerintah Pusat harus adil pada pemerintah daerah dalam pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) walaupun daerah yang sudah berpenghasilan tinggi tidak lagi menerima Dana Alokasi Umum. Namun bukan berarti pemerintah daerah tidak membutuhkan Dana Alokasi Umum.

Pemerintah pusat tidak seharusnya memangkas Dana Alokasi Umum, karena masing-masing daerah masih membutuhkan Dana Alokasi Umum untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Raharjo , 2011, Pembiayaan Pembangunan Daerah, Yogyakarta, Graha Ilmu.

A.S. Hikam. (2010) Demokrasi dan Civil society. Jakarta:LP3ES

Budiarjo, Miriam. 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Fakih, Mansour, 2005, Perencanaan Starategi Bagi Organisasi Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Hanif, Nurcholis, 2005, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta, PT. Grasindo

Husman, Husnaini dan Setiady, Akbar, Purnomo. 2004 , Metodologi Penelitian Sosial, PT. Bumi Aksara, Jakarta.